

PERSPEKTIF HADIS TENTANG IHTIKAR

Junaid bin Junaid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email: junaidbinjunaid@gmail.com

Abstract

In Islamic teaching have some problematic for some people or human being. Specially in the law of Islamic economic study, one foundation of the reference or basicly is from the hadith of the Prophet Muhammad Pbih. Because the hadith it self contains many things which is directly related to the Islamic economics. One of the theory is about hoarding. Where the hoarding of goods based on the perspective of hadith have a bad impact and also forbidden to do. As has been forbidden by the holy prophet through his hadith.

Kata Kunci: Perspektif; hadis; ekonomi Islam; Ihtikar.

A. Pendahuluan

Islam adalah *al-din* (baca: agama) Allah swt yang diwasiatkan untuk mempelajari pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad Saw dan wajib atau harus menyampaikan kepada seluruh manusia.¹ Hal ini identik dengan istilah syariat, yaitu kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (baca: *hablun min Allah*) dan hubungan kemasyarakatan (baca: *hablun min al-Nas*) yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.² juga identik pula dengan istilah wahyu, yaitu wahyu Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidatun wa Syariatun*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 7.

² Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqih al-slami fi Taubih al-Jadid*, (Beirut: Darul Fikr, 1968), h. 30.

Oleh karena itu, Islam sebagai sebuah ajaran dan keyakinan bagi umat Nabi Muhammad Saw, tentunya memiliki banyak kajian-kajian yang dapat dijadikan oleh umat Islam itu sendiri sebagai sarana dalam mengembangkan wawasan dan membuka cakrawala berpikir secara baik, benar dan objektif.

Dalam ajaran Islam tidak dikenal istilah pemaksaan, tetapi yang adanya sebuah pemaksaan yang fleksibel. Artinya bahwa kandungan ajaran Islam tersebut bagi penganutnya adalah ada satu kebebasan yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang berbasis kepada koridor ajaran Islam itu sendiri. Misalnya adalah masalah perekonomian (baca: jual beli) yang berlandaskan pada syariat Islam dan khususnya tentang problem *ihtikar*.

Ihtikar (baca: penimbunan barang) dalam teori ekonomi merupakan satu sifat yang dilakukan oleh pedagang atau pengusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dapat menyebabkan unsur kecurangan dan penzaliman dalam proses jual beli yang sebenarnya. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan adalah adanya kerugian bagi konsumen itu sendiri. Sehingga menurut syariat Islam, bahwa perbuatan *ihtikar* adalah satu perbuatan yang harus dihindari dan ditinggalkan oleh seorang pengusaha atau pedagang.

Penimbunan barang itu sendiri memiliki dalil naqli (baca: Alquran dan hadis) sebagai sebuah sumber yang paling mendasar dalam perekonomian Islam. Seperti dalam tulisan ini dengan merujuk pada salah satu dalil naqli tersebut, yaitu bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. dalam hal ini bagaimana perspektif hadis itu sendiri tentang masalah *ihtikar* tersebut.

B. Sekilas tentang al-Ihtikar

Ihtikar merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pemngumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.³ Juga diartikan dengan menimbun atau menahan agar tejual.⁴

Sedangkan definisi *ihtikar* secara terminologi para ulama berbeda-beda memberikan makna daripada ihtikar tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Ihtikar* adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.⁵
2. *Ihtikar* adalah membeli barang-barang yang kalau disimpan akan menimbulkan bencana, seperti makanan, minyak, biji rami, kapas, dan sebagainya kemudian menyimpannya.⁶
3. *Ihtikar* adalah membeli suatu barang dan menyimpangnya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnyaharga barang tersebut.⁷
4. *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, Negara,

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pesantren al-Munawwir, 1997), h. 307.

⁴ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 307.

⁵ Yusuf Qasim, *Attami Attijariyahfi Mijan al-Syariah*, (Kairo: darul Nahdah al-Arabiyah, 1986), h. 75.

⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibnul Khathab RA*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb, S dkk dengan judul, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khaththab, RA*, (Cet.I: Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 169.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1981), h. 162.

ataupun hewan (peternakan) amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.⁸

Tampak sekali dari empat definisi yang dilontarkan oleh para ulama di atas dapat dipahami bahwasanya istilah *ihlikar* tersebut merupakan sebuah teori ekonomi Islam yang memiliki makna dengan model menimbun, artinya membeli memiliki makna dengan model menimbun, artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Biasanya barang-barang yang ditimbun adalah barang sandang melimpah dan harganya murah. Ketika barang sudah jarang dan harganya tinggi, sipenimbun mengeluarkan barangnya dengan harga tinggi sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat. Walaupun harganya tinggi, karena pembeli sangat membutuhkan biasanya barang kebutuhan pokok, maka dengan sangat terpaksa pembeli pun membelinya. Dalam hal ini yang dirugikan dalam penimbunan tersebut adalah semua lapisan masyarakat dan juga terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan.

C. Hadis tentang Penimbunan Barang

Hadis sebagai salah satu sumber yang dalam syariat Islam, tentunya memuat banyak hal yang berhubungan langsung dengan *hablu min al-nas*. Dalam hal ini khususnya yang berhubungan dengan masalah ekonomi Islam (baca: jual beli), yaitu masalah *ihlikar* atau penimbunan barang.

Adapun teks hadis yang berhubungan langsung dengan persoalan ihtikar (baca: penimbunan barang) adalah sebagai berikut:

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al., edit., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 655.

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله ص.م.: لا يحتكر الا خاطئ (روه مسلم).⁹

Terjemahannya:

“Dari Ma’mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, “tidaklah seseorang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa.” (H.R.Muslim).

Melalui pendekatan tekstual bahwasanya hadis Nabi Muhammad Saw tersebut di atas dapat dipahami bahwa istilah *al-Ihtikar* atau penimbunan barang merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam . karena memiliki dampak yang negatif terhadap proses jual beli yang berasaskan pada ajaran dan norma Islam itu sendiri. Sehingga nabi Muhammad Saw sangatlah melarang bagi pedagang yang melakukan istilah penimbunan barang. Dalam hal ini, *al-Ihtikar* atau penimbunan barang tersebut hukumnya adalah haram.

Secara kualitas hadis tersebut di atas merupakan hadis sahih. Hal ini berdasar dari sumber periwayatnya, yaitu Ma’mar Ibnu Abdullah Ibn Nafi’ Ibn Fadlah Ibn ‘Auf Ibn ‘Ubaid Ibn ‘Umai’ Ibn Ady Ibn Ka’ba Ibn Luay Ibn Galib Al-Quraishy adalah Ma’mar Ibn Ma’mar. Ia termasuk sahabat paling dulu masuk Islam dan pernah hijrah ke Habasyah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW., Umar Bin Khattab , dan lain-lain, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah Sa’ad Ibn Musayyab, Basyir Ibn Afifah Al-Adawy dan lain sebagainya.

Dalam pandangan para muhaddisin mengatakan diantaranya adalah Ibn Abdul Al-Bir Berkata, Ma’mar bin Abdullah termasuk tokoh dari Bani Adwi yang cerdas. Sedangkan menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Ma’mar bin Adullah selalu dekat dan bersama nabi Saw dalam menyiarkan ajaran Islam. Dan

⁹ Imam Muslim, *sahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 328.

dibuktikan bahwa suatu waktu Ma'mar pernah mencukur rambut Rasulullah SAW.¹⁰

Untuk memahami kesempurnaan apa yang terkandung dalam hadis tersebut, maka sangat diperlukan menggunakan pendekatan *kontekstual*. Hal ini dilakukan supaya tercipta satu pemaknaan yang lebih valid dan akurat terhadap apa yang terkandung dalam Hadis Nabi Muhammad Saw tentang *ihtikar* tersebut.

Pada dasarnya, dalam hadis Nabi Muhammad Saw tersebut di atas tidak dijelaskan jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, sehingga kalangan ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa diharamkan menimbun barang apa saja yang akan menudaratkan orang lain. Salah satunya Abu Yusuf yang menyatakan bahwa barang apa saja dilarang untuk ditimbun kalau akan menyebabkan kemudaratkan kepada manusia walaupun barang tersebut emas dan perak.¹¹ Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama terakhir dari Hnabilah, Ibn Abidin Syaukuni, dan sebagian ulama malikiyah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer, sedangkan barang kebutuhan sekunder tidaklah diharamkan. Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-barang yang biasa diperdagangkan karena akan menimbulkan ketidakstabilan harga.¹²

Menurut jumhur mufaqihhun berpendapat bahwa *ihtikar* atau penimbunan barang diharamkan bila terdapat syarat sebagai berikut:

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), h. 220-221.

¹¹ Al-Shan'any, *Subulu As-Salam*, Jus III, (indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 25.

¹² Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujahid wa Nahayatul Al-muqtashid*, (Bairut: Darul Fikr, t.th.), h. 164. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Libanon: Darul Fikr 1981), hlm. 98

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk setahun penuh.
2. Barang yang ditimbunnya dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan para konsumen sangat membutuhkannya.
3. Penimbunan itu dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkannya, misalnya makanan, pakaian dan lain-lain. Dengan demikian penimbunan barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, hal ini tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.¹³

Sedangkan mengenai hukum dari penimbunan barang tersebut, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi, secara umum pendapat mereka dapat digolongkan menjadi dua kelompok:

1. Menurut Mazhab Jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Al-Imamiyah, dan Al-Kasani dari golongan Hanafiyah, bahwa penimbunan barang hukumnya haram. Dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi manusia.
2. Menurut pendapat Fuqahah dari kalangan mazhab hanafiyah bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya adalah *makruh tahrim*. Di mana dengan penimbunan barang tersebut diperbolehkan jika demi kemaslahatan manusia.

Pendapat Ulama Hanafiyah tidak menimbulkan sanksi hukum karena hanya *makruh tahrim* saja. Padahal penimbunan barang demi keuntungan pribadi sangatlah tercela karena ia berusaha mengeruk keuntungan ketika orang lain

¹³ Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ., Ma (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; LSIK, 1997), hlm. 103.

sangat kesusahan atau menari di atas penderitaan orang lain. Tindakan itu tentu saja tidak bermoral dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, sangat tepat kalau perbuatan itu diharamkan oleh syara. Hal ini diperkuat pula dalam kajian sistem sosial Islam ditekankan jika ada pelaku penimbunan di tengah-tengah mereka, Allah mengancamnya dengan penyakit berat dan kebangkrutan.

Dengan demikian, pendapat jumhur lebih tepat karena akan menimbulkan dampak hukum (sanksi hukum), misalnya dengan ta'jir ataupun merampas barang yang ditimbunnya. Dan untuk mencegah agar para penimbun tidak leluasa melakukan perbuatan tercela tersebut, maka diperlukan peran pemerintah untuk mengatur tentang satu mekanisme perdagangan secara adil dan menindak dengan tegas orang yang melakukan kecurangan. Hal ini karena perbuatan mereka menimbulkan banyak korban kalau barang tersebut mereka jual kepada masyarakat dengan harga sangat tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh penduduk. Dan juga berdasarkan pada keumuman dalil-dalil tentang ihtikar ini adalah diharamkannya penimbunan atas semua jenis barang yang menjadi hajat orang banyak karena akan menyusahkan mereka jika terjadi penimbunan.

Sedangkan penyebutan penimbunan bahan makanan secara khusus sebagian ulama menerangkan, maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa penimbunan bahan makanan lebih berbahaya ketimbang penimbunan barang lainnya. dan tidak heran kalau para penimbun dianggap sebagai sejelek-jeleknya hamba yang secara tidak langsung telah merampas hak dan kehidupan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. karena dalam prinsip orang yang melakukan penimbunan adalah apabila barang itu murah maka mereka para penimbun akan murka dan apabila barang itu mahal, maka ia akan bergembira. Itulah salah satu sifat yang dimiliki oleh para penimbun barang. Tetapi dampak negatif dari

perbuatan tersebut adalah ketika yang menimbun barang selama empat puluh hari, dianggap telah terlepas dari Allah SWT, sebagaimana sabda nabi Saw. yang berbunyi:

مَنْ أَحْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّءَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَّءَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَّءَ مِنَ اللَّهِ مِنْهُز

Terjemahnya:

“ siapa yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari ia sungguh telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya”¹⁴

Adapun menimbun barang yang dikoordinasikan oleh pemerintah atau individu dengan maksud untuk persiapan menghadapi muslim pakeklik, dan nantinya akan dijual dengan harga yang wajar atau dibagikan secara cuma-cuma atau saja diperbolehkan. Tetapi perbuatan tersebut jarang sekali terjadi, nanti kejadiannya pada hal-hal tertentu, seperti pada suatu perbuatan yang sifatnya mendesak (baca: darurat). Hal ini seperti dalam sejarah Nabi Yusuf pernah menimbun barang dalam jumlah yang sangat besar berdasarkan pada mimpi raja yang sangat ia ta'birkan bahwa negeri itu akan mengalami musim kemarau sangat panjang. Ketika mimpi tersebut terjadi, penduduk negeri berdatangan untuk membeli barang yang pengelolaannya dipercayakan kepada Nabi Yusuf.

Berkenaan dengan masalah penimbunan barang, Dr. Yusuf Qardhaw¹⁵ menyebutkan syarat-syarat pedagang yang akan mendapat rida Allah SWT., yaitu antara lain:

1. Pengusaha dan pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah tidak memperdagangkan barang yang diharamkan syara'.
2. Pengusaha dan pedagang tidak melakukan dan memiliki sifat menipu dan berkhianat.

¹⁴ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Kairo: Mustafa Al-Babil Halaby, t.th.), h. 47.

¹⁵ Yusuf Qardhaw, *op.cit.*, h. 756-762.

3. Pengusaha dan pedagang tidak menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkan dengan tujuan memperoleh laba masyarakat sebanyak-banyaknya karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumannya haram.

Hal itu mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah SAW. member predikat penimbun dengan *khati'un* (orang yang berbuat dosa) bukanlah perkara yang ringan karena Allah SWT. juga telah menyebut *fir'aun* dan Haaman beserta tentaranya dengan istilah yang sama, sebagaimana dalam firman Allah Swt. disebutkan sebagai berikut:

فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ أَنْ فِرْعَوْنٌ وَهَمَّانَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ

Terjemahannya:

“maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.”¹⁶

4. Pedagang tidak boleh bersumpah palsu, bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah walaupun ia benar. Hal ini karena sumpah akan menggelembungkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan neraka kelak di akhirat.
5. Pedagang tidak boleh meninggalkan harga kepada kaum muslimin. Apalagi kalau harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah;
6. Hendaklah pedagang mengeluarkan zakat 2,5 %, baik harta yang berputar maupun harta perniagaan yang diketahui nilainya.
7. Pedagang tidak boleh disibukkan oleh perdagangannya sehingga lalai atas kewajiban agamanya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Penterjemah Alquran, 1990), h. 610.

Tampak sekali, bahwasanya dalam konteks hukum ekonomi Islam dikatakan orang yang menimbun barang (baca: ihtikar), terutama makanan pokok untuk dijual dengan harga tinggi pada waktu orang lain sangat membutuhkannya adalah perbuatan dosa (baca: haram). Akan tetapi, kalau menimbun barang demi kemaslahatan penduduk dalam rangka menyiapkan musim peceklik tidak termasuk berbuat dosa, tetapi dibolehkan.

Adapun hikmah yang urgen sekali di balik diharamkannya *al-ihtikar* ataupun penimbunan barang adalah agar jangan sampai sifat tamak sebagian orang dalam suatu masyarakat menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan bagi banyak orang. Sebab, Islam adalah agama yang bertujuan memberikan dan merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak serta mencegah dari kemudharatan.

Demikian pula bahwa syariat ekonomi Islam sangat menghormati usaha seseorang dan melindungi kepemilikan pribadi, tetapi Islam juga memberikan hak kepada pemerintah untuk merampas atau memaksa pelaku penimbunan untuk menjual barangnya dengan harga pasar. Tidak hanya itu, Islam juga memberikan hak kepada pemerintah untuk mempidanakannya jika pelaku *al-ihtikar* menolaknya karena tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum.

D. Penutup

Ihtikar atau dalam istilah syara' lebih dikenal dengan sebutan penimbunan barang adalah satu tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya secara drastis. Hal ini disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat, negara, ataupun hewan memerlukan perodk, manfaat, atau jasa tersebut.

Ihtikar yang secara umum meliputi hal-hal berikut: membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediannya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga jual naik, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak, penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

Dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw. dikatakan bahwa Islam itu sendiri memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan maqashid syariah dalam proses perdagangan, karena tindakan menimbun akan menyengsarakan kahalayak ramai. Dan dalam hubungannya dengan ekonomi Islam adalah mengakibatkan kerugian yang berarti kepada konsumen. Juga dalam lingkungan sosial kemasyarakatan akan terjadi satu bentuk kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Darul Fikr, 1989.
- Al-Shan'any. *Subulu As-Salam*, Jus III. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Fiqih al-slami fi Taubih al-Jadid*. Beirut: Darul Fikr, 1968.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., edit., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Penterjemah Alquran, 1990.
- Ibn Rusyd, *Biyadatul Al-Mujahid wa Nahayatul al-Muqtashid*. Bairut: Darul Fikr, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pesantren al-Munawwir, 1997.
- Muslim, Imam *sahih Musli*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Qasim, Yusuf. *Attami Attijariyahfi Mijan al-Syariah*. Kairo: darul Nahdah al-Arabiyah, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Beirut: Darul Fikr, 1981.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: Aqidatun wa Syariatun*. Beirut: Darul Fikr, 1983
- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*. Kairo: Mustafa Al-Babil Halaby, t.th.
- Yanggo, Chuzaimah T. HA. Hafiz Anshary AZ., Ma (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; LSIK, 1997